

Daftar Pustaka

A. Buku

1. Abd. Wahab Khallaf, 1996, *Ilmu Ushul Al-Fiqih*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Thalchah Mansoer, dengan judul “*Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqhi)*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
2. Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Sosiologis dan Filosofis)*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
3. Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
4. Ali Ahmad Chomzah, 2013, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Tanah IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
5. Artidjo Alkostar, 2014, “*Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 11 (Mei 2004), FH UII, Yogyakarta..
6. Boedi harsono, 1970, *Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan Hukum Agraria Indonesia, jilid I, Djambatan, Jakarta.*
7. Bedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
8. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
9. E. Kristi Poerwandari, 1998, *Metode Penelitian Sosial*, Universitas Terbuka, Jakarta.
10. Endriatmo Soetarto dan Shohibuddin, 2005, *Reforma pertanahan : Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan*, Konsorsium

Pembaharuan Agraria (KPA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jakarta.

11. *Felix MT. Sitorus, 2002, Lingkup Agraria Dalam Menuju Keadilan Agraria, Akatiga, Bandung.*
12. *Gunawan Wiradi, 2009, Reforma pertanahan, Insist Press, KPA, dan Pustaka Belajar, Bekasi.*
13. *Hyronimus Rhiti, 2011. Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta.*
14. *Margono, 2004, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta.*
15. *Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.*
16. *Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.*
17. *Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.*
18. *Satjipto Rahardjo, 1991. Ilmu Hukum Cet. Ke-3, Alumni, Bandung.*
19. *W. Friedman, 1990. Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Rajawali, Jakarta.*
20. *Winardi, 1991, Manajemen Perilaku Organisasi, Citra Aditya Bhakti, Bandung*

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. TAP MPR
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Badan Pertanahan Nasional 1990 No.9
5. Undang- undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1663).
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

C. Lain - lain

<https://kominfo.go.id/index.php/perhutanan-sosial-artikel>. Diakses 18 Juni 2018.

Pskl.menlhk.go.id/akps/index.php/site/cara_pendaftaran. Diakses 18 Juni 2018.

